Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang *Home Renovation for Poor Citizen in Padang Municipality*

Achmadi Jayaputra

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Jl Dewi Sartika 200, Jakarta Timur.

E-mail: <jachmadi@yahoo.co.id>. Telpon (+62) 8128518190.

Diterima 22 Maret 2013, disetujui 3 April 2013.

Abstract

The Ministry of Social Affairs holds a Social Rehabilitation Program for the citizens having unadequate home condition for living. The program aimed at the poors by providing assistance in the form of funds Rp 10.000.000,- per family to rehabilitate their homes. The goal of the program is that the poors can improve their own homes in order to meet the health requirements. The implementation of the program activities is to go through the process set out by the guidelines to be followed in some stages. Research locations is chosen purposively in Lubuk Buayo District, Padang. At this location, assistance has been provided to 50 families. Data sources are obtained from the informations of several informants encountered. The research result shows that there are some poor people who can perform these activities in accordance to the stages guided, while some are not able to complete the renovation of the houses. Therefore, the model suggested that home assistance repairment should be provided and based on the situation and condition of the poors participating in the program.

Key words: Home Rehabilitation Assistance-Poor Citizens-Padang Municipality

Abstrak

Kementerian Sosial RI mempunyai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang ditujukan kepada warga miskin dengan memberi bantuan berupa dana berjumlah Rp 10.000.000,- per kepala keluarga (KK). Tujuannya; agar warga miskin dapat memperbaiki rumahnya sendiri supaya memenuhi syarat kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses yang diatur dalam suatu pedoman yang harus diikuti secara bertahap. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Kecamatan Lubuk Buayo, Kota Padang. Di lokasi ini bantuan telah diberikan kepada 50 KK. Sumber data diperoleh dari keterangan dari beberapa informan yang ditemui. Hasil penelitian menunjukkan, ada sebagian warga miskin yang dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai tahapannya. Sementara ada juga yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya. Oleh karena itu disarankan, model pemberian bantuan sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemampuan warga miskin.

Kata Kunci: Bantuan Rehabilitasi Rumah- Warga Miskin-Kota Padang

A. Warga Miskin dan Kebutuhan Rumah

Sebagai makhluk manusia dalam mempertahankan kehidupannya harus mencari dan memenuhi kebutuhan dasar dengan cara bekerja. Penghasilan yang diperoleh disesuaikan dengan kebutuhan individu atau keluarganya. Semua dilakukan sebagai tanggung jawab pribadi dan terhadap anggota keluarganya. Kebutuhan dasar bagi tiap orang atau keluarga selalu berbeda, termasuk juga pemenuhan kebutuhan dasar yang diutamakan anggota keluarga seperti makan dan rumah. Penghasilan menentukan dalam menentukan kebutuhan utama. Hanya keluarga tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan makan pastilah dipenuhi secara individu atau kepala keluarga yang bertanggung jawab membelikan bahan makanan untuk diolah atau membeli makan. Namun, kebutuhan rumah sangat beragam dari kepemilikan terbagi dua yaitu; milik sendiri atau milik orang lain. Rumah milik sendiri perolehannya juga beragam karena ada yang sudah bisa membelinya atau dengan cara mencicil seperti dalam program Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Masih banyak dijumpai rumah milik orang lain karena keluarga yang bersangkutan belum mampu membeli rumah sesuai dengan penghasilannya.

Apalagi warga miskin yang kebanyakan belum memiliki rumah. Mereka masih banyak yang menumpang dengan orang lain atau keluarga lain karena ketidakmampuannya untuk membeli rumah atau penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan. Itupun sering dikatakan kurang, sehingga belum terpikirkan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Memang ada yang memiliki rumah, tetapi rumah yang dihuni tidak atau kurang memenuhi syarat kesehatan disebabkan penggunaan bahan material seadanya yang dibeli dengan harga murah.

Kementerian Sosial RI dalam menangani keluarga miskin mempunyai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). Berdasarkan data diketahui ada sekitar 14,8 juta tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau keluarga fakir miskin. Mereka akan mendapat program tersebut, sehingga perlu

diakukan secara bertahap. Tahun 2008 telah melaksanakan perbaikan rumah terhadap 4.856 Kepala Keluarga di 37 kabupaten/kota pada 16 provinsi. Kemudian tahun 2009 dilanjutkan di 22 kabupaten/kota pada 13 provinsi sebanyak 2.346 unit rumah. Tahun 2010 ditargetkan kegiatan bagi 6.144 unit rumah dan 123 unit Sarana Lingkungan (Sarling) (Anonim, 2010: 2).

Perbandingan antara fakir miskin perlu dibantu dengan target yang akan dilakukan Kementerian Sosial RI tidak seimbang dan akan memerlukan waktu yang lama. Tetapi kegiatan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan terhadap daerah atau lokasi yang sudah ditentukan bisa di wilayah perkotaan dan perdesaan. Target yang akan dicapai tiap lokasi antara 50–100 Kepala Keluarga. Pelaksananya selain menggunakan dana APBN, penerima program harus berperan serta dalam perbaikan rumahnya melalui kelompok kerja yang dibentuk untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu perhatian dan peran serta pihak lain seperti pemerintah daerah, instansi swasta, organisasi sosial dan orang peduli.

Kegiatan tersebut sangat menarik karena diharapkan adanya peran serta masyarakat. Selain itu dana yang diberikan kurang dari yang seharusnya diperlukan, sehingga penerima program harus menambah sendiri. Hal ini sangat penting untuk memahami pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan peran serta masyarakat. Lokasi akan dipilih secara sengaja (*Purposive*) di Kecamatan Koto Tengah di Kota Padang. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan pernah bertugas di Kota Padang dan terbatasnya kalau dilakukan di tempat lain. Penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) tahun 2010. Jumlahnya 100 KK berada dalam dua kecamatan yaitu; Koto Tengah dan Bungus Teluk Kabung. Di Koto Tengah terdapat 50 KK penerima bantuan berada dalam lima kelurahan; Balai Gadang, Panjang Iku, Koto Pulai, Pasie Nan Tigo, dan Lubuk Buaya.

Sumber Data: Keperluan penelitian dipilih lima kelompok informan dengan catatan masing-masing diperlukan antara dua atau tiga orang. Informannya yaitu ; pelaksana program di

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Lurah, Ketua Kelompok, dan Pendamping. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok. Wawancara dilakukan terhadap informan instansi pemerintah. Sedangkan diskusi kelompok terarah dilaksanakan di Kelurahan Teluk Buaya yang dihadiri 10 orang terdiri dari; Pengurus Kelompok Kerja, pendamping, dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara dan diskusi diolah dengan analisis isi yang mengutamakan pemahaman terhadap keterangan yang diperoleh. Terutama berkaitan dengan proses dan pelaksanaan kegiatan.

Secara administrasi Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Seluruh wilayah tersebut telah tersentuh program pemberdayaan masyarakat, khususnya bantuan rumah bagi warga miskin. Selama ini Kementerian Sosial RI baru memberikan bantuan perbaikan rumah pada dua kecamatan yaitu; Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung. Tiap kecamatan menerima alokasi perbaikan rumah hanya untuk 50 KK dan tersebar di tiap kelurahan yang ada. Tentunya jumlah tersebut tidak sebanding dengan usulan yang masuk ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran untuk 2.100 KK.

Pelaksanaan perbaikan rumah yang didanai APBN, dalam pelaksanaannya diharapkan ada peran serta masyarakat. Sebab dana yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,- per KK sebagai perangsang (stimulus), sehingga pasti ada yang merasa kurang atau berlebihan. Jika bagi penerima bantuan merasa kurang, maka mereka harus menambah sendiri kekurangannya. Tentunya akan menjadi masalah dari keluarga yang bersangkutan karena disebabkan beberapa hal antara lain; keluarga miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap, memiliki rumah yang tidak layak huni, dan sebagainya.

Kaitannya dengan perbaikan rumah, maka perlu dikaji tentang pelaksanaannya dimulai dari proses sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini dianggap penting untuk melihat pemahaman warga miskin terhadap program tersebut. Oleh karena itu permasalahannya yaitu; bagaimana pelaksanaannya perbaikan rumah yang dilakukan secara berkelompok?

B. Penyebab Kemiskinan dan Kebutuhan Dasar

Kajian yang akan dibahas terbatas pada tiga konsep yaitu; kemiskinan, kebutuhan dasar, dan perbaikan rumah. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan, sehingga dianggap penting untuk dibahas. Konsep kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu; aspek agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Sudah banyak para ahli menulis dan menjelaskan konsep yang disusun berdasarkan teori-teori dan aspeknya. Khususnya agama Islam melihat kemiskinan dari dua konsep yaitu fakir dan miskin. Menurut pandangan agama Islam, fakir miskin yaitu orang yang hidupnya melarat dan membutuhkan bantuan. Sebutan lain bagi orang yang memiliki kebutuhan mendesak tetapi tidak meminta pada orang lain. Sedangkan miskin adalah orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya; 1) Faktor Struktural; dampak kebijakan pemerintah menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Ada suatu golongan yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan. Ada segolongan yang tidak mungkin hidup wajar karena penghasilannya terbatas; 2) Faktor Budaya; dampak budaya dan dukungan lingkungan. Kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup banyak bahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kondisi atau kualitas budaya demikian menyebabkan kemiskinan; 3) Faktor Sosial; kondisi-kondisi lingkungan sosial ekonomi yang menyebabkan seseorang menjadi miskin (Selo Sumardjan, 1997; Edi Suharto, 2009: 16 – 18).

Freidman (Edi Suharto, dkk; 2003), kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial basis tersebut meliputi modal yang produktif atau asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lain-lain); organisasi sosial dan politik (partai politik, koperasi);

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan orang. Kemiskinan dan hubungannya dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial (Edi Suharto, 2009: 15 – 16).

1. Kekurangan materi; Adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan perumahan,
2. Rendahnya penghasilan; BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang diukur berdasarkan asupan kalori sebesar 2.100 kalori yang diperlukan manusia untuk mampu bertahan hidup,
3. Kebutuhan sosial; dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial. Dengan demikian, kemiskinan hakekatnya menunjukkan situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara dan masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 18, bahwa: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial. (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi; a. peningkatan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup; b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Undang-undang tersebut mengisyaratkan tiap pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menggali potensi dan sumber daya setempat dalam menanggulangi permasalahan

sosialnya. Sebab berharap dana pemerintah melalui APBN atau APBD belum memungkinkan melaksanakan seluruh program pelayanan terhadap warga miskin. Biasanya potensi dan sumber daya tersedia cukup banyak, terutama banyak kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat saat ini. Penggalan kearifan lokal juga dengan maksud mengurangi beban anggaran pemerintah karena sebagian tanggung jawab pemerintah berada di masyarakat itu sendiri.

Kemiskinan konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan secara umum; kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar fakir miskin antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan,
2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesempatan berusaha, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan yang sehat,
3. Rasa aman dari perlakuan kekerasan atau ancaman tindak kekerasan,
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kebutuhan dasar menurut Medgley (1997) dalam perspektif pekerjaan sosial, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dikategorikan sebagai orang yang tidak sejahtera atau mengalami masalah sosial. Ada lima kebutuhan dasar yang disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu penting (Huda, 2009):

1. Kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, papan atau rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, yaitu kebutuhan bebas dari penjjajaan,

bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.

3. Kebutuhan Sosial, yaitu kebutuhan untuk memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.
4. Kebutuhan Penghargaan, yaitu kebutuhan pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri, yaitu kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuai hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya Pasal 1 ayat 3 bahwa, kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Dengan demikian rumah menjadi penting bagi warga miskin, sehingga memiliki fungsi bagi penghuninya. Menurut Gymnastiar (2003) (Suradi, dkk, 2012: 15) rumah memiliki empat fungsi:

1. Tempat berzikir. Kalau kita ingin rumah kita menyejukkan, pergunakanlah rumah yang kita tempati untuk memperbanyak dzikir dan menyebut nama Allah.
2. Sumber Energi. Rumah tangga itu sumber energy dan sumber semangat bagi keluarga. Jadi jika terjadi sesuatu, rumahlah generator semangatnya. Jika misalnya suami sedang memiliki masalah, maka inilah saatnya istri menjadi motivator. Laki-laki yang gagah perkasa sekalipun, tetap menginginkan ada isteri yang mendaminginya, yang berperan sebagai pengayomnya.
3. Tempat saling koreksi. Fungsi rumah bagi suami, isteri, dan keluarga adalah sebagai cermin. Tidak ada tempat yang paling aman untuk saling mengoreksi kecuali di rumah. Suami, isteri saling koreksi, begitu juga dengan anak. Sebab jika kita dikoreksi orang lain biasanya suka sakit hati, maka rumah tangga adalah korektor yang paling aman.
4. Tempat sinergi dan saling melengkapi. Suami, isteri saling bersinergi begitu juga dengan anak, baik dalam ilmu dunia maupun akherat. Kunci penting lainnya yakni dengan memperbanyak ilmu. Karena kebanyakan, sebuah keluarga babak belur akibat kurang iman dan ilmu yang terbatas.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Pasal 1 bahwa; rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemilikinya. Kemudian dijelaskan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

Pemikiran, bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tiap orang. Rumah sebagai bentuk bangunan mempunyai dua fungsi yaitu; pertama, fungsi fisik sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang mendiaminya dari ancaman atau gangguan dari luar seperti panas, dingin, hujan, dan gangguan binatang. Kedua, fungsi non fisik sebagai tempat yang menjamin penghuninya untuk bersosialisasi, reproduksi, ekonomi, pelestarian nilai-nilai agama dan adat.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang merupakan bagian penelitian yang pernah dilakukan. Menurut Creswell, Rossman and Rallis (Samsul Hadi, dkk; 2011: 262 – 263), pertama analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data.

1. **Pemilihan Lokasi Penelitian:** Dipilih secara sengaja (*Purposive*) di Kecamatan Koto Tangah di Kota Padang. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan pernah bertugas di Kota Padang dan terbatasnya kalau dilakukan di tempat lain. Penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) tahun 2010. Jumlahnya 100 KK berada dalam dua kecamatan yaitu; Koto Tangah dan Bungus

Teluk Kabung. Di Koto Tengah terdapat 50 KK penerima bantuan berada dalam lima kelurahan; Balai Gadang, Panjang Iku, Koto Pulai, Pasie Nan Tigo, dan Lubuk Buaya.

2. **Pengumpulan data:** dilakukan dengan tiga cara yaitu; studi dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Studi dokumentasi melalui buku-buku yang diterbitkan unit operasional, hasil penelitian, buku umum, dan data lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap 10 Kepala Keluarga penerima bantuan (stimulan) warga berumah tidak layak huni. Diantaranya dua orang sebagai Ketua Kelompok Kerja. Sedangkan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada informan yang melaksanakan kegiatan. Hasil wawancara dan diskusi diolah dengan analisis isi yang mengutamakan pemahaman terhadap keterangan yang diperoleh. Sumber data terbagi dua kelompok informan. Pertama, masyarakat terdiri dari tujuh keluarga penerima bantuan, dua Ketua kelompok dan tokoh masyarakat. Kedua, instansi pemerintah yaitu; pelaksana program di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Pendamping, dan Lurah.
3. **Analisis Data:** Dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif. Analisis data kualitatif bisa melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

Lokasi dipilih secara sengaja ada tiga kriteria; terdapat dua kecamatan di Kota Padang yang menerima program RS RTLSH, adanya warga penerima bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan adanya kelompok kerja. Oleh karena itu dipilihlah Kelurahan Lubuk Buayo di Kecamatan Koto Tengah. Penerima bantuan menyebar dalam empat kelurahan, tetapi untuk kepentingan penelitian ini hanya memilih satu kelurahan saja.

D. Bantuan Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang

Secara administratif Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat terletak di

pantai barat Pulau Sumatera yang dahulu disebut Andalas. Luasnya 694,96 Km² terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Wilayah daratan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, bagian utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Bagian daratan dilintasi 21 sungai besar dan kecil, hulunya berasal dari Bukit barisan. Wilayah lautan di bagian selatan dengan 19 pulau yang tersebar dan bagian dari Samudera Indonesia, terbesar Pulau Bitangur 56,78 Ha dan terkecil Pulau Ular 1,38 Ha. Secara administrasi terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Di beberapa tempat masih menggunakan kewilayahan adat disebut *nagari* yang melingkupi atau lintas wilayah kecamatan dan kelurahan. Seperti dalam wilayah Kecamatan Pauh terdapat Nagari Pauh Limo karena di daerah ini terdapat lima suku yaitu; Caniago, Bodi, Jambak, Kumbang, dan Melayu. Keturunan yang berasal dari kelima suku tersebut secara turun temurun mendiami wilayah itu.

Tahun 2010 penduduk Kota Padang berjumlah 833.562 jiwa. Laju pertumbuhan 1,57 % disebabkan karena kelahiran dan perpindahan penduduk dari beberapa kabupaten disekitarnya. Perpindahan karena kedatangan dari berbagai wilayah Provinsi Sumatera Barat dan luar provinsi tersebut kepadatan penduduk sekitar 1.199 jiwa per Km². Kecamatan Koto Tengah merupakan wilayah terpadat, berpenduduk 162.079 jiwa dan wilayahnya mencapai 33 % dari luas Padang, sehingga kepadatannya 698 jiwa per Km². Kecamatan ini wilayahnya terdiri dari berbagai sarana seperti perumahan dan perkantoran, hanya sedikit tanah kosong. Sedangkan Kecamatan Bungus Teluk Kabung terendah kepadatannya, penduduknya berjumlah 22.896 jiwa dengan kepadatan 227 jiwa per Km². Sebagian besar kecamatan ini masih terdiri dari hutan, lainnya hanya permukiman dan sarana besar seperti pergudangan, gardu induk listrik, depo bahan bakar minyak, dan pelabuhan perikanan (Anonim; 2011: 59).

Masyarakat Minangkabau membagi wilayahnya menjadi dua; wilayah daratan dan pesisir. Wilayah daratan mencakup beberapa

kabupaten yang berada di pedalaman yaitu; Agam, Bukit Tinggi, Lima Puluh Koto, Pasaman, dan Payakumbuh. Wilayah tersebut merupakan wilayah asal suku bangsa tersebut. Wilayah pesisir mencakup dua kabupaten dan dua kota yaitu; Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman .

Khususnya kota Padang, secara statistik belum ada data tentang asal usul suku bangsa yang mendiami kota ini. Namun, penghuninya ada yang sudah lama tinggal di kota seperti orang Nias, orang Jawa, orang Batak, keturunan Cina, dan sebagainya. Terlihat dari nama penamaan beberapa daerah tempat tinggal dengan nama suku bangsa tersebut. Artinya Kota Padang tidak didominasi satu suku bangsapun. Hanya saja dalam pergaulan hidup sehari-hari, mayoritas berasal dari suku bangsa Minangkabau dengan penggunaan bahasa Minang selalu terdengar. Dapat dikatakan juga kota ini dihuni berbagai suku bangsa (*multi ethnic*).

Kota Padang sebagai kota yang berkembang ditandai dengan sarana dan prasarana umum yang selalu bertambah. Pertambahan hanya pada sarana dan prasarana yang bersifat umum seperti sarana ibadah, perkantoran pemerintah dan swasta. Sedangkan sarana perumahan dan permukiman sangat terbatas. Termasuk perumahan bagi kaum miskin yang berada di pinggiran kota. Berdasarkan kategori kemiskinan, secara materi digolongkan masyarakat miskin karena masih ada yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan pekerjaan pokoknya sebagai petani atau berdagang secara kecil-kecilan.

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) di Provinsi Sumatera Barat terdapat jumlah Rumah Tangga (Ruta) 416.102 = 443.819 Keluarga = 1.813.972 Anggota Rumah Tangga. Di antaranya terdapat di Kota Padang (Anonim, 2010; Hamonangan Ritonga, 2011: 15). Artinya penduduk miskin di Kota Padang sekitar 120.041 jiwa. Mereka dianggap telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kementerian Sosial RI pernah membantu dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). Ada juga bantuan dari

berbagai instansi pemerintah lainnya atau pihak swasta.

Lokasi penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tahun 2010 berjumlah 100 KK berada dalam dua kecamatan yaitu; Koto Tengah dan Bungus Teluk Kabung. Khusus di Kecamatan Koto Tengah terdapat 50 KK penerima bantuan yang tersebar dalam lima kelurahan; Balai Gadang, Panjang Iku, Koto Pulai, Pasie Nan Tigo, dan Lubuk Buaya.

Penduduk Kecamatan Koto Tengah luasnya 232,25 Km² atau sekitar 33,42 % dari wilayah Kota Padang. Kecamatan Koto Tengah terdiri dari 13 kelurahan. Daerah ini merupakan daerah pantai di bagian barat Kota Padang dan wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Kebanyakan daerah permukiman, lahan kosong dan pertanian. Permukiman penduduk menyebar dan sudah banyak perumahan yang dibangun beberapa pengembang. Terdapat jalan utama yang menghubungkan Kota Padang menuju kota-kota lainnya seperti ke arah utara menuju Bukit Tinggi, Lubuk Sikaping dan terus ke utara memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara mulai dari Kota Padang Sidempuan di daerah Mandailing dan seterusnya sampai ke Medan. Ke arah barat menyusuri pantai melewati Pariaman dan Lubuk Basung selanjutnya memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara sampai ke Sibolga dan Singkil yang termasuk wilayah Provinsi Aceh.

Kecamatan Koto Tengah terbanyak penduduknya yaitu; 162.079 jiwa. Tetapi karena wilayahnya mencapai sepertiga Kota Padang, maka kepadatan penduduknya termasuk rendah yaitu 698 jiwa/Km². Khususnya Kelurahan Lubuk Buaya merupakan pusat aktivitas baru berkembang yang dipengaruhi keberadaan Bandara Udara Internasional Minangkabau dan banyaknya pemukiman baru. Dilihat dari jenis kelamin jumlahnya seimbang laki-laki 81.590 jiwa (50, 34 %) dan perempuan 80.489 jiwa (49,66 %). Penduduk Kecamatan Koto Tengah mengalami pengurangan karena tahun 2009 pernah mencapai 166.033 jiwa. Kondisi tersebut disebabkan makin banyaknya penduduk pendatang pindah ke tempat lain karena dilihat dari kondisi wilayahnya termasuk daerah

Ring Satu bencana alam air pasang (tsunami) (Anonim, 2010: 23-59-63; Haryani, 2011: 16).

Kondisi Sosial Budaya penduduk Kecamatan Kota Tengah separohnya dihuni oleh suku bangsa Minangkabau. Mereka selalu mengetahui asal usul sukunya seperti Chaniago, Jambak, Koto, Melayu, dan Tanjung. Memang tiap orang yang tinggal dalam suatu Nagari atau kelurahan harus diketahui asal usul sukunya karena masing-masing mempunyai kepala suku. Ini dilakukan dalam rangka memelihara adat istiadat Minangkabau misalnya jangan sampai perkawinan yang dilakukan masih terhitung dalam suku yang sama. Bisa juga untuk saling menjaga nama suku masing-masing, sehingga bila ada perselisihan dapat diselesaikan secara adat.

Hal lain terlihat dalam pergaulan hidup sehari-hari saling menggunakan bahasa Minangkabau dialek Padang. Dialek tersebut juga digunakan suku bangsa lain yang tinggal di daerah tersebut karena sebagian lagi terdiri dari pendatang yang berasal dari daerah lain seperti Jambi, Bengkulu, Jawa. Pendatang selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga bila ada pendatang yang sudah lama tinggal dalam satu kelurahan dipastikan yang bersangkutan lancar menggunakan dialek Padang.

Penduduk Kota Padang dan kelurahan dapat dilihat dari penganut agama. Umumnya atau lebih dari 98 % beragama Islam. Selebihnya terdiri dari Penganut agama Nasrani sebagai penganut Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Kondisi tersebut memperlihatkan sebagian besar penduduk berasal dari suku bangsa Minangkabau dan pendatang yang ditandai dengan banyaknya Masjid dan Musholla. Sedangkan penduduk pendatang yang beragama lain merupakan pendatang dari daerah Batak dan keturunan Cina. Sarana Ibadah yang tersediakan kebanyakan di Kecamatan Padang Selatan dan Padang Barat (Anonim, 2010 : 72).

Sarana lingkungan permukiman di lokasi penelitian dapat dikatakan lengkap. Terutama semua jalan sudah teraspal dan dapat menghubungkan antar kelurahan atau antar kecamatan, sehingga dapat dilalui berbagai jenis kendaraan. Hanya wilayah tertentu yang kurang

baik karena rusak ringan seperti daerah rawa, antar gang yang belum ada jalan masuk.

Sarana lain untuk ibadah, pendidikan dan kesehatan. Tempat ibadah kaum muslim paling banyak. Hampir tiap kelurahan ada satu atau dua masjid dan Musholla. Masjid kebanyakan dibangun dengan mengandalkan sumbangan penduduk setempat atau masyarakat sekitarnya dan bantuan dari pihak lain. Sedangkan Musholla kebanyakan didirikan secara perorangan di tanah keluarga. Sarana ibadah bagi pemeluk agama lain berada di luar kedua kecamatan.

Sarana pendidikan dari mulai tingkat pra kanak-kanak sampai menengah ada dalam tiap kelurahan. Sarana pendidikan tercatat sebagai berikut; PAUD ada di tiap kelurahan, sehingga di Kota Padang terdapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 263 unit, TK 223 unit, SD Negeri 353 unit dan swasta 55 unit, SMP Negeri 37 unit dan swasta 44 unit, SMA Negeri 16 unit dan swasta 32 unit (Anonim, 2010: 81).

Sarana kesehatan berupa Puskesmas terdapat di tiap kecamatan dan Puskesmas Pembantu (Pustu) hanya ada dalam beberapa kelurahan. Namun demikian klinik dan praktek dokter sudah banyak yang terdapat dalam tiap kelurahan. Sarana kesehatan tersebut sangat digunakan penduduk karena pembayarannya terjangkau dan tarifnya murah.

Kementerian Sosial dalam membantu sarana lingkungan permukiman yaitu pembuatan riol dan jalan setapak. Di Kecamatan Koto Tengah telah dibuat riol atau saluran air sepanjang 600 meter untuk melancarkan jalannya air dari jalan ke sungai. Pengerjaannya dilakukan secara gotong royong.

1. Perencanaan: Sebenarnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sudah menetapkan keluarga miskin dalam dua kategori yaitu; Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Kategori tersebut berdasarkan 14 indikator kemiskinan secara nasional yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Nama tersebut dipaku dengan tempelan aluminium (plat) yang terpasang di bagian depan rumah atau di atas pintu. Oleh Karena itu sasaran utama keluarga miskin yang sudah terdata

berdasarkan nama dan alamat.

Penerima bantuan dikategorikan keluarga miskin dengan dilihat dari; jenis pekerjaan terdiri dari buruh, tani dan nelayan; tidak memiliki tanah sendiri karena merupakan tanah kaum; tidak memiliki asset, dan tidak memiliki dana. Sejak awal petugas dan pendamping telah mendata calon penerima bantuan. Namun tidak semuanya mendapatkan bantuan karena kuota yang diberikan sangat terbatas. Kebanyakan keluarga yang memperoleh bantuan merupakan keluarga yang menumpang di rumah orang tua atau mertua. Demikian juga dilihat dari pemilikan harta benda (*asset*), hanya sedikit yang memilikinya. Harta benda yang ada di rumahnya merupakan harta benda orang tua atau mertua. Keluarga baru belum bisa membeli harta benda karena penghasilan yang tidak cukup. Penghasilan yang diperoleh digunakan hanya untuk makan anggota keluarga seadanya. Tiap keluarga masih mengandalkan pekerjaannya, apalagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Biasanya para isteri bekerja di sektor informal dengan cara berjualan di rumahnya atau di tempat lain. Justru ada juga kaum perempuan atau isteri yang menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah. Mereka berjualan di sektor informal seperti berdagang makanan dan minuman kecil di rumahnya atau di tempat lain.

Dana atau bantuan stimulan untuk tiap Kepala Keluarga yang akan disalurkan Rp 10.000.000,- per KK. Dana tersebut diterima dalam dua tahap. Tahap pertama diterima awal Desember 2010 dan dibelanjakan pertengahan Desember 2010. Tahap kedua diterima bulan Januari 2011 dan langsung dibelanjakan. Penerima bantuan hanya menandatangani penerimaan dana sebesar yang ditentukan dari Ketua Kelompok Kerja. Ketua berunding dengan anggotanya mengenai bahan bangunan rumah yang akan dibeli. Selanjutnya penerima bantuan akan dikirim bahan bangunan rumah dari toko yang sudah disepakati. Setelah bahan bangunan rumah diterima, maka keluarga yang bersangkutan mengerjakan perbaikan

rumah yang dikerjakan sendiri atau dengan tukang. Jika dikerjakan sendiri, maka tidak mengeluarkan upah. Gambaran demikian biasa bagi suami yang bekerja sebagai tukang atau yang dapat mengerjakan bangunan rumah, sehingga dikerjakan sendiri. Kalaupun ada anggota keluarga yang membantu sesuai kebutuhan dan biasanya saat pekerjaan berat seperti mengerjakan lantai, dinding, atap dan lain-lain. Anggota keluarga yang membantu akan diberi semacam uang terima kasih di lain waktu.

Selain itu, ada juga yang menjadi tukang seorang mertua. Dengan demikian suami yang bersangkutan harus menyiapkan bahan bangunan rumah yang diperlukan, makan dan minuman. Penyediaannya sesuai dengan hari kerja, sehingga mertuanya bekerja sesuai dengan bahan bangunan yang tersedia tersebut. Oleh karena itu kalau bahan bangunan rumah dapat digunakan untuk yang penting-penting dahulu seperti lantai dari keramik, dinding diplester, dan atap lengkap dengan seng. Bagian dalam yang belum diselesaikan seperti sekat atau kamar ditinggalkan saja sampai adanya dana lagi. Selesai mengerjakannya, mertua yang bersangkutan berhenti bekerja.

Sosialisasi dilaksanakan tim dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI. Kegiatan dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang beberapa instansi sosial kota dan kabupaten. Intinya menyiapkan atau memberi kesempatan kepada 100 KK – 200 KK keluarga miskin yang akan menerima bantuan perbaikan rumah. Jumlah tersebut berada dalam satu kota dan satu kabupaten, sehingga akan ditentukan satu lokasi dalam satu desa atau kelurahan dalam satu kecamatan.

Diskusi dilakukan untuk menetapkan dan menyiapkan lokasi. Oleh karena itu, Kota Padang menjadi satu lokasi untuk wilayah perkotaan. Hasil diskusi ditetapkan Kecamatan Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menugaskan TKSK dan PSM

untuk melakukan pendataan sesuai dengan arahan yang diberikan. Sasaran penerima bantuan diutamakan bagi keluarga miskin yang rumahnya sudah ditempel plat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sesuai dengan jumlah yang diperlukan, maka dilakukan pendataan keluarga. Ketika sudah ada penetapan calon penerima bantuan, mereka dikumpulkan di kecamatan untuk mendapatkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pembicara dan pendamping yang telah ditunjuk. Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi di tingkat bawah dan hanya berkaitan dengan bantuan dana yang akan diterima, kegiatan yang akan dilakukan dan batas waktunya.

Namun, jarak antara sosialisasi dengan penerimaan bantuan sangat jauh karena bantuan baru turun bulan Desember 2010. Selama itu tidak ada kegiatan berkaitan dengan penerimaan bantuan. Hanya saja, baik penerima bantuan yang sudah pasti maupun keluarga yang sudah didata tetapi tidak menerima bantuan selalu menanyakan ke pendamping. Para pendamping menjelaskan, bahwa bantuan belum diterima dari Kementerian Sosial. Sesuai dengan ketentuan penerima bantuan akan langsung memperbaiki rumahnya masing-masing. Ketika dana sudah masuk ke rekening kelompok, maka dilakukan pertemuan tentang penggunaan dana tahap pertama. Oleh karena itu secara langsung pula perlu menjelaskan kembali kepada penerima bantuan untuk menggunakan dana sesuai dengan keperluan.

Identifikasi dan seleksi secara prosedur atau proses pelaksanaan kegiatan RS RTLH sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI. Dimulai dari pendataan, identifikasi, seleksi, sosialisasi, pertemuan kelompok, pemberian bantuan, pembelian bahan bangunan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang memberikan

rekomendasi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pelaksana, TKSK dan PSM sebagai pendamping lapangan. Kebijakannya; perbaikan rumah tiap kelurahan hanya untuk 10 KK atau 10 rumah, dan tiap rumah berada dalam satu Rukun Tetangga (RT). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial.

- 2. Pelaksanaan:** Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di lokasi penelitian. Program perbaikan rumah tahun 2010 sudah diusulkan secara berjenjang mulai dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, lalu direkomendasikan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan usulan tersebut Kementerian Sosial telah melakukan verifikasi. Pelaksanaannya pertengahan tahun 2011, tahap awal dimulai dengan sosialisasi dan diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan.

Perbaikan Rumah: Pelaksanaan kegiatan terbagi dua. Pertama, kebanyakan dikerjakan sendiri penerima bantuan karena berpengalaman atau bisa menjadi tukang dan hanya dibantu anggota keluarga. Orang yang membantu menyumbang tenaga, ada yang dibayar kemudian sesuai dengan kemampuan pemilik rumah dan ada yang tidak dibayar. Kedua, sebagian membayar tukang dan pekerja. Dengan demikian mereka mencari dana untuk membayar tukang Rp 80.000,- per hari dan pekerja Rp 60.000,- per hari. Pelaksanaan kegiatan secara terus menerus 10–15 hari. Namun ada juga yang dikerjakan selama satu bulan lebih.

Berdasarkan pengamatan dari 40 KK atau rumah yang diperbaiki hanya sekitar 12 rumah (30 %) yang selesai atau sempurna. Kelompok ini memperbaiki rumah di lokasi yang sama dengan ukuran kecil seperti 6 x 5 meter. Masih banyak rumah yang belum selesai karena antara lain; rumah yang diperbaiki menjadi lebih besar, berpindah dari lokasi yang lama, dan menggunakan bahan bangunan lebih banyak. Adanya kearifan lokal; tanah milik kaum – khususnya milik keluarga perempuan atau istri (*Matriachat*),

sehingga semua tidak mempunyai sertifikat dan dengan pernyataan yang diketahui lurah dan camat; anggota keluarga yang membantu pelaksanaan tidak mendapat upah karena masih ada hubungan keluarga; biasanya dalam pembangunan pondasi dilakukan secara bergantian dalam kelompok (julo-julo); pemilik rumah menyiapkan antara lain satu kali makan tiap hari kerja, minuman kopi dan makanan kecil.

Pendampingan. Pendampingan dimulai sejak ditetapkan penerima bantuan yang memuat nama dan alamat yang sebenarnya. Pendamping terdiri dari TKSK. Namun, di lapangan TKSK dibantu PSM yang secara bersama-sama sejak pengumpulan data awal. Pendampingan yang dimaksud; 1) Sosialisasi. Saat diadakan sosialisasi, pendamping mendampingi calon penerima bantuan ke kecamatan. Mulai dari memberi undangan, menemani sampai calon penerima bantuan kembali ke rumah. Ada hal tertentu yang perlu dijelaskan seperti syarat-syarat yang diperlukan untuk dilengkapi sesuai kebutuhan; 2) Pendataan. Pendataan yang dilakukan bersama dengan petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pendampingan dengan melihat langsung kondisi rumah dan penghuninya; 3) Penerimaan Dana. Pendampingan saat menerima dana di kelurahan dilakukan dalam dua tahap. Pertengahan Juli 2012 dilakukan penerimaan dana tahap pertama Rp 5.000.000,-, penerima bantuan dihadirkan untuk menandatangani uang atas namanya masing-masing. Penerima bantuan diberikan tidak dalam bentuk kontan karena mereka akan menerima bahan bangunan yang diperlukan di rumah masing-masing. Bahan bangunan dibeli di toko bahan bangunan terdekat atas kesepakatan dengan ketua kelompok; 4) Perbaikan Rumah. Secara berkala atau sewaktu-waktu pendamping meninjau perbaikan rumah. Terjadi dialog antara pendamping dengan penerima bantuan. Hal-hal yang dibicarakan berkaitan dengan kekurangan dalam perbaikan rumah seperti dana tidak cukup, perbaikan rumah agak lambat dan sebagainya. Pendamping

hanya memberi saran karena penggunaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing.

Asesmen. Ada dua kemudahan yang diperoleh dari penerima bantuan. *Pertama*, penerima bantuan merupakan penduduk setempat yang menetap. Mereka sangat mengharapkan bantuan karena selama ini tidak dapat mengumpulkan dana untuk perbaikan rumahnya. Sebagaimana diketahui kebanyakan kaum laki-laki bekerja di sektor informal yang memperoleh penghasilan terbatas. Sedangkan tempat tinggal yang ditempati kebanyakan milik kaum dari isterinya. Dengan demikian bisa saja dalam satu rumah terdiri dari lebih dari satu keluarga inti yang disebut keluarga luas (*saparuiik*). Model keluarga luas tersebut sangat banyak terjadi, sehingga penerima bantuan banyak atas nama isteri.

Kedua, penerima bantuan mempunyai peluang dalam memperbaiki rumahnya. Berdasarkan pengamatan, hampir semua penerima bantuan membangun kembali rumahnya—kebalikan dari kegiatan dengan memperbaiki bagian rumah yang rusak. Rumah yang akan diperbaiki selama dua tahun ini dianggap belum selesai karena masih ada bagian rumah yang belum diperbaiki. Alasan yang dikemukakan dana atau bantuan yang diterima tidak cukup untuk ukuran rumahnya.

Umur. Penerima bantuan kebanyakan (85 %) pasangan usia produktif yang berumur 18 – 35 tahun, dan sebagian lagi (15 %) berusia lanjut. Pasangan usia produktif menunjukkan bentuk keluarga baru atau keluarga muda yang membentuk rumah tangga. Kebanyakan mereka masih tinggal di rumah keluarga luas istri (*matriachat*). Sedangkan keluarga berusia lanjut merupakan keluarga inti penerima bantuan, sehingga ada kemungkinan keluarga tersebut menampung keluarga inti baru dari anak-anaknya. Dilihat dari jenis kelamin penerima bantuan ada Kepala Keluarga yang laki-laki dan perempuan. Keluarga inti masih dihitung dari pihak ibu, sehingga ada kecenderungan penerima bantuan berdasarkan nama istri

karena keluarga inti baru tersebut tinggal di rumah keluarga istri. Kecuali itu kaum laki-laki sebagai penerima bantuan dianggap sebagai Kepala Keluarga, namun tinggal di rumah mertua atau keluarga istri.

Pendidikan. Pendidikan dari penerima bantuan bervariasi karena masih ada yang tidak sekolah 10 KK dan ada yang pernah duduk di SLTA. Ketika pengamatan di lokasi, banyak kaum ibu yang sudah tua atau janda mendiami rumah miliknya. Mereka ini mengaku tidak sekolah karena kebanyakan hanya mengikuti pengajian pada majelis taklim atau di surau secara informal. Pengertian bersekolah hanya mengikuti pendidikan di sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA. Kepala Keluarga yang menyatakan sekolah yaitu mereka yang pernah mengikuti pendidikan secara formal misalnya lebih dari separoh pernah SD (57,5%), SMP (17,5%) dan SMA (15%). Ini memperlihatkan kondisi mereka seadanya ditandai dengan pendidikannya kebanyakan rendah dan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

Pekerjaan. Lebih separohnya sebagai buruh (55%) dan selebihnya dagang (20%), jasa transportasi (17,50%), dan ibu rumah tangga (7,50%). Bekerja sebagai buruh lebih banyak dilakukan kaum laki-laki yang melakukan pekerjaan sebagai tukang, nelayan dan penarik becak. Pekerjaan ini sama dengan mereka yang tergolong di bidang jasa transportasi yang bekerja sebagai tukang ojek. Oleh karena itu banyak responden yang laki-laki bekerja apa saja. Ketika ditawarkan pekerjaan tukang, maka ia akan bekerja dalam waktu tertentu dan meninggalkan pekerjaan sebagai tukang ojek. Ketika tidak menjadi tukang, maka ia terus menunggu penumpang di pangkalan ojek atau di tempat tertentu mencari penumpang. Banyak juga ibu rumah tangga yang membuka warung di rumahnya dengan berjualan makanan dan minuman ringan. Membuka warung di rumah sendiri menggunakan bagian depan rumah, sehingga hanya memerlukan membuka dan menutup pintu atau jendela. Atau

menyediakan tempat atau sarana seadanya seperti meja digunakan meletakkan bahan makanan, gantungan plastik atau kayu untuk menyusun makanan atau minuman yang digantung. Pagi dagangan dikeluarkan dan kalau sudah habis atau menjelang sore diangkat ke dalam rumah. Penghasilan yang diperoleh hanya untuk keperluan sesaat. Biasanya membantu suami yang bekerja di sektor informal karena penghasilannya tidak mencukupi. Ada juga kaum ibu secara penuh memang membiayai keperluan rumah tangganya seperti makan sehari-hari dan lainnya. Biasanya mereka terdiri dari janda atau kepala keluarga tunggal, sehingga berdagang di rumah merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keluar rumah hanya tiga hari sekali untuk belanja barang dagangan atau keperluan lain. Di rumah dapat menambah penghasilan sambil menjaga anak-anak.

Penghasilan selalu dikaitkan dengan jenis pekerjaan. Penghasilan keluarga terbagi dua; penghasilan Kepala Keluarga dan penghasilan seluruh anggota keluarga. Tempat tinggal keluarga luas sebagian besar tinggal di rumah isteri (matrilokal) menunjukkan dalam keluarga luas ada penghasilan Kepala Keluarga dan penghasilan anggota keluarga lainnya. Penghasilan Kepala Keluarga kebanyakan antara Rp 600.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,- (70%), dan selebihnya di bawah Rp 600.000,- (25%). Hanya sedikit yang berpenghasilan di atas Rp 1.500.000,- (5%). Ini menunjukkan penghasilan rata-rata Rp 20.000,- per hari. Seiring dengan jenis pekerjaan yang sebagian besar sebagai buruh dan jasa, sehingga dapat dikatakan penghasilan mereka rendah dan tidak tetap. Penghasilan tersebut hanya memenuhi kebutuhan makan anggota keluarga sehari-hari.

Sedangkan penghasilan seluruh anggota keluarga tidak jauh berbeda dengan jumlah penghasilan Kepala Keluarga. Masih banyak yang berpenghasilan Rp 600.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,- per bulan (40%), selebihnya di bawah Rp 600.000,- (7,50%)

dan di atas Rp 1.500.000,- (2,50%). Ini menunjukkan penghasilan Kepala Keluarga masih menjadi andalan keluarga dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Penghasilan keluarga, separohnya tidak memberi jawaban. Artinya data yang diperoleh tidak mendukung adanya jawaban yang pasti. Terutama dialami keluarga luas karena masing-masing keluarga dengan penghasilan yang diperoleh untuk keperluan keluarga itu sendiri, sehingga agak sulit menghitung pengeluaran seluruh anggota keluarga. Alasannya penghasilan keluarga harus dihitung dari keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah dan siapa saja anggota keluarga yang memperoleh penghasilan untuk dibawa pulang. Selain itu harus menghitung untuk apa saja pengeluaran dari keluarga, sehingga harus ada pengeluaran yang bersifat pribadi dan untuk kepentingan bersama.

Dua kasus sebagai contoh dari Kelurahan Lubuk Buayo. Pertama, keluarga A - suami tinggal di rumah keluarga isteri. Mereka sebagai keluarga inti dengan dua anaknya yang masih kecil. Suami bekerja sebagai tukang dengan upah Rp 80.000,- per hari, tetapi yang dibawa pulang hanya Rp 50.000,- karena digunakan untuk ongkos dan bayar hutang. Suami memperbaiki rumah isterinya tanpa ongkos, bahkan menambah bahan bangunan dari barang-barang sisa di tempat kerja. Isteri tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Kedua, keluarga B - suami tinggal di rumah keluarga isteri, mereka keluarga luas terdiri dari keluarga inti suami-isteri dan tiga anak, serta tinggal juga bapak dan ibu mertua. Suami bekerja sebagai buruh dan isterinya berdagang makanan minuman ringan. Penghasilan keluarga masing-masing untuk memenuhi kebutuhan keluarga inti masing-masing, sehingga keluarga inti senior tidak ada gabungan penghasilan.

Jumlah Tanggungan. Tanggungan keluarga responden diketahui tergantung bentuk keluarga yaitu keluarga inti atau keluarga luas. Bentuk keluarga inti, biasanya hanya terdiri dari suami-isteri dan anak-anak

yang berjumlah dua orang. Bentuk keluarga inti hanya 25%. Sedangkan bentuk keluarga luas, tanggungan keluarga tergantung yang dominan. Oleh karena itu tanggungan keluarga lebih dari tiga orang (75%). Sebab dalam satu rumah bisa saja yang dominan mertua karena sebagai pemilik rumah dan biasanya anak-anak atau menantunya belum mampu dalam ekonomi, sehingga harus ditanggung sebagiannya seperti makan sehari-hari. Menantu penghasilannya untuk keperluan tertentu atau keperluan sesaat seperti membayar listrik dan air minum.

Ada juga menantu yang lebih dominan. Hal ini terjadi walaupun menantu menumpang di rumah mertuanya, ia juga sebagai anggota keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Oleh karena itu penghasilan yang diperoleh untuk menanggung keluarga luas yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini terjadi biasanya sang menantu mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan cukup atau mapan, sehingga rumah belum menjadi prioritas – terpenting menanggung anggota keluarga yang ada.

Informasi RS-RTLH. Pengetahuan tentang bantuan perbaikan rumah diakui penerima bantuan (100 %) diperoleh dari pendamping sebagai petugas lapangan yang ditugaskan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Alasannya pendampinglah yang secara terus menerus berada di sekitar mereka. Termasuk seorang tokoh masyarakat mengakui tidak tahu informasi bantuan bagi keluarga miskin tersebut. Biasanya bantuan diberikan pejabat setingkat wali kota atau anggota dewan berkaitan dengan posisinya menjelang pemilihan kepala daerah. Bagi penerima bantuan informasi tidak tahu karena dana yang diperoleh dari BRI dan dibagikan langsung kepada mereka. Artinya dana berasal dari Negara atau pemerintah pusat. Jarang yang menyebutkan Kementerian Sosial RI.

Kebutuhan Rumah. Kebutuhan rumah menjadi penting dengan banyaknya pola keluarga luas yang menumpang dari pihak perempuan (Matrilokal). Dipastikan tiap rumah yang dihuni oleh satu keluarga luas

yang terdiri dari beberapa keluarga inti lebih banyak laki-lakinya sebagai orang yang datang (*sumando*). Rumah yang diperbaiki menjadi lebih besar karena yang akan menempati keluarga besar, sehingga dalam pelaksanaan kekurangan dana untuk membeli bahan bangunan dan ongkos tukang. Biasanya keluarga yang bersangkutan berhutang ke toko bahan bangunan. Pembayaran dilakukan dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan. Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal menjadikan pemiliknya harus memenuhi berbagai bahan bangunan yang diperlukan. Namun, masih banyak yang belum bisa menyelesaikan rumahnya. Hal ini terjadi karena kemauan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan atau modal yang dimiliki.

Bagi keluarga yang memperbaiki rumahnya menggunakan jasa tukang dipastikan ongkosnya secara harian atau borongan, upah seorang tukang Rp 70.000,- atau Rp 80.000,- per hari dan seorang pekerja Rp 60.000,- per hari. Kepala Keluarga mencari pinjaman untuk membayar upah tukang atau pekerja sesuai dengan perjanjian. Hal ini terpaksa dilakukan karena mereka tidak punya pilihan mencari tambahan karena pekerjaan yang dilakukan paling-paling hanya dapat disisihkan sekitar Rp 20.000,- atau Rp 30.000,-. Apalagi kalau tidak bekerja tentunya tidak ada penghasilan. Pinjaman dana sebagai biaya tambahan banyak yang diperoleh dari anggota keluarga juga. Dengan demikian pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Walaupun demikian, biasanya pemberi pinjaman yang akan menerima kelebihan dana yang telah dipinjamkan. Cara tersebut ditempuh sebagai tanda terima kasih dari peminjam. Dibandingkan kalau keluarga yang bersangkutan meminjam kepada orang lain yang menawarkan pinjaman, tentunya dibebani waktu yang sudah ditentukan ditambah bunga.

Ada juga yang membantu dengan memberi pinjaman tanpa bunga. Namun

ditentukan waktunya seperti dalam waktu satu tahun atau dua tahun. Penentuan waktu tersebut oleh si peminjam sebagai tabungan dan akan digunakan saat tertentu atau ada rencana secara berjangka seperti persiapan perkawinan anaknya, mendirikan rumah dan lain-lain. Perjanjian tetap saja diberlakukan dengan perhitungan yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga peminjam akan melunasinya. Cara demikian biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap lebih kaya dari anggota keluarga.

Kondisi Sosial. Secara sosial, kondisi rumah menjadi penting bagi keluarga yang bersangkutan. Perbaikan rumah telah meningkatkan derajat kehidupan di masyarakatnya, sehingga pemilik rumah dapat disamakan dengan pemilik rumah lainnya yang dibangun dengan biaya sendiri. Fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga luas yang memberi kesan bagi keluarga tersebut. Terutama dilihat dari kepemilikan tanah, pada umumnya pemilik rumah dan pekarangan kaum perempuan (*Matriarchat*). Oleh karena itu kepala keluarga lebih banyak kaum perempuan karena kaum mereka yang memiliki hak. Selain itu kaum laki-laki yang tercatat sebagai penghuni rumah tersebut dapat dikatakan semuanya sebagai pendatang dari daerah Minangkabau atau dari luar Kota Padang.

Kondisi Psikis. Dirasakan rumah baru lebih nyaman karena di bangunan sesuai dengan kebutuhan kesehatan seperti ventilasi, ruang keluarga dan ruang tamu. Rumah lama kebanyakan belum memenuhi syarat kesehatan karena ada bagian tertentu yang tidak dipelihara dengan baik. Kenyamanan dirasakan sangat membantu penerima bantuan yang memperlihatkan bertambahnya bahan bangunan rumah atau baru. Keluarga mulai memfungsikan ruang tamu sebagai tempat berkumpul anggota keluarga lain.

Pedampingan. Sebagai pendamping lapangan ditunjuk TKSK. Namun kenyataannya TKSK dibantu oleh PSM dari tiap kelurahan. Kedua unsur tersebut tidak

dapat dipisahkan karena seluruh kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan sosial secara berjenjang saling membutuhkan dan saling membantu. Ditambah lagi dengan adanya Seksi Kesejahteraan Sosial yang ada di tiap kelurahan. Bedanya Seksi Kesejahteraan Sosial hanya bertugas di kantor kelurahan. Sedangkan PSM sebagai orang yang bertugas di masyarakat.

Umumnya yang diangkat sebagai TKSK terdiri dari kaum perempuan. Kebanyakan yang sudah berkeluarga dan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Memang persyaratan untuk menjadi TKSK tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Tetapi pemilihan TKSK dari kaum perempuan diartikan mereka lebih aktif di masyarakat, pekerjaan yang dilakukan tidak terikat dan dapat dilakukan sesuai keperluan, dan tidak banyak tuntutan.

Di lokasi penelitian TKSK terdiri dari ibu rumah tangga. Keberadaan mereka di lapangan dapat memperlancar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan PSKS dan PMKS. Kegiatan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan stimulan dalam memperbaiki rumah tidak layak huni.

Pendamping hanya menerima honor dan uang perjalanan. Tidak ada sarana lainnya yang diberikan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pendamping menggunakan sarana kerja milik pribadi seperti lap top dan motor. Honor dan uang perjalanan yang diterima digunakan juga untuk keperluan lain seperti menyusun dan menggandakan laporan, membeli makanan dan minuman. Jika dibandingkan dana yang diterima dengan pengeluaran tidak seimbang karena lebih besar pengeluaran. Pendamping yang melakukan kegiatan pendampingan terhadap penerima bantuan berbeda dengan pendamping KUBE yang mendapat dana pendampingan selama melakukan kegiatannya. Oleh karena itu, menurut pendamping perlu disesuaikan dengan keperluannya. Permintaan hanya satu yaitu minta disediakan kendaraan

bermotor roda dua untuk memudahkan pemantauan dan kegiatan lainnya.

3. Realitas Implementasi Bantuan Rumah

Terminasi. Terminasi atau pemutusan kegiatan bagi penerima bantuan ketika dana telah diterima dalam dua tahap. Semestinya terminasi dilanjutkan dengan kegiatan lain sebagai upaya meningkatkan daya keluarga miskin. Belum ada kegiatan lain atau kegiatan baru bagi penerima bantuan baik dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang atau instansi pemerintah lainnya.

Penerima bantuan melakukan kegiatan semula. Belum ada pengaruh perkembangan dari perbaikan rumahnya. Menurut keterangan dari Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang, mereka yang menerima bantuan belum ada kebijakan secara pasti. Boleh saja berbagai kegiatan diteruskan oleh instansi lain karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang akan memperhatikan PMKS lain yang belum memperoleh bantuan.

Jenis Bantuan Rumah lainnya. Terdapat enam jenis bantuan yang dianggap pro rakyat yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta. Jenis bantuan untuk rakyat yaitu: (a) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program Kementerian Sosial RI, perbaikan biayanya Rp 10.000.000,- per KK atau rumah sebanyak 100 rumah. Pembuatan sarana lingkungan Rp 40.000.000,- hanya dua kegiatan. (b) Bantuan Rumah Janda Perintis Kemerdekaan. Program Kementerian Sosial RI, perbaikan biayanya Rp 20.000.000,- hanya satu rumah. (c) Bantuan Keswadayaan Rakyat. Program Kementerian Perumahan Rakyat, perbaikan rumah Rp 5.000.000,- per rumah dan sarana lingkungan Rp 4.000.000,-. (d) Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat. Program Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Barat, perbaikan rumah ada yang diterima dalam bentuk dana Rp 15.000.000,-, bahan bangunan rumah Rp 3.000.000,-, Rp 50.000.000,- terdiri dari bahan bangunan (fisik) dan keperluan lain (non fisik), dan bedah rumah. Kegiatan dilakukan hanya dalam satu kelurahan dan

satu kecamatan. (e) Rehabilitasi Rumah Rakyat (Rekompak). Program dari Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM), perbaikan rumah sesuai dengan kategori kerusakan yang ditentukan konsultan dan juru bangunan. Misalnya; rusak ringan dibantu sebesar Rp 5.000.000,- per rumah, dan rusak berat dapat dibantu paling tinggi Rp 20.000.000,- per rumah.

Faktor Berpengaruh terbagi dua yaitu, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Pendukung meliputi, pendamping melakukan kegiatan secara bertahap mulai dari pendataan, pembagian dana, pemantauan, dan menyusun laporan, perbaikan rumah secara gotong royong (*goro*) dan *julo-julo*. Kebanyakan yang membantu masih ada hubungan keluarga dengan pemilik rumah. Faktor Penghambat meliputi, belum ada pembinaan lanjut dari instansi sosial dan dana kurang.

E. Rangkuman

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang memberikan rekomendasi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pelaksana, TKSK dan PSM sebagai pendamping lapangan. Kebijakannya; perbaikan rumah tiap kelurahan hanya untuk 10 KK atau 10 rumah, dan tiap rumah berada dalam satu Rukun Tetangga (RT). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial. Kesimpulannya, proses pelaksanaan kegiatan RS RTLH sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan – Kementerian Sosial RI. Penerima bantuan dikategorikan keluarga miskin karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menggunakan 14 indikator kemiskinan. Diperoleh data keluarga miskin; pekerjaan terdiri dari buruh, tani dan nelayan; tidak memiliki tanah sendiri – hanya tanah kaum; tidak memiliki asset, dan tidak memiliki dana. Dana bantuan yang diterima sebesar Rp 10.000.000,- per KK diterima dalam dua tahap. Seluruh dana tersebut dibelikan bahan bangunan rumah sesuai dengan keperluan. Pelaksanaan kegiatan terbagi dua. *Pertama*, kebanyakan dikerjakan sendiri

penerima bantuan karena berpengalaman atau bisa menjadi tukang dan hanya dibantu anggota keluarga. Orang yang membantu menyumbang tenaga, ada yang dibayar kemudian sesuai dengan kemampuan pemilik rumah dan ada yang tidak dibayar. *Kedua*, sebagian membayar tukang dan pekerja. Dengan demikian mereka mencari dana untuk membayar tukang Rp 80.000,-/hari dan pekerja Rp 60.000,- per hari. Pelaksanaan kegiatan secara terus menerus 10 – 15 hari. Namun ada juga yang dikerjakan selama satu bulan lebih.

Berdasarkan pengamatan dari 40 KK atau rumah yang diperbaiki hanya sekitar 12 rumah (30 %) yang selesai atau sempurna. Kelompok ini memperbaiki rumah di lokasi yang sama dengan ukuran kecil seperti 6 x 5 meter. Masih banyak rumah yang belum selesai karena antara lain; rumah yang diperbaiki menjadi lebih besar, berpindah dari lokasi yang lama, dan menggunakan bahan bangunan lebih banyak. Adanya kearifan lokal; tanah milik kaum khususnya milik keluarga perempuan atau istri (*Matriachat*), sehingga semua tidak mempunyai sertifikat dan dengan pernyataan yang diketahui lurah dan camat; anggota keluarga yang membantu pelaksanaan tidak mendapat upah karena masih ada hubungan keluarga; biasanya dalam pembangunan pondasi dilakukan secara bergantian dalam kelompok (*julo-julo*); pemilik rumah menyiapkan antara lain satu kali makan tiap hari kerja, minuman kopi dan makanan kecil.

Masukan yang diajukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah. Ke depan atau tahun 2012 biaya perbaikan rumah yang layak Rp 15.000.000,-. Alasannya biaya harus disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bangunan. Ke depan bantuan perbaikan rumah disesuaikan dengan bantuan kebutuhan dan tidak disamakan. Model rumah PNPM dapat ditiru karena menggunakan konsultan dan fasilitator kelurahan. Perbaikan rumah disejajarkan dengan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan humanistik karena rumah secara budaya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga inti dan sedapat mungkin menampung keluarga luas matrilineal. Selain itu

perlu dijelaskan fungsi secara cultural, structural dan situasional.

Pustaka Acuan

- Alfitri, 2011. *Community Development. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim, 2010. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.
-, 2011. *Padang Dalam Angka 2010*. Padang: Bappeda Kota Padang dan BPS Kota Padang.
-, 2003. "Kota Padang" dalam *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. (Editor; FH Santoso), hal 108 – 114.
-, 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007*. Jakarta: BPS.
- Azwar, 2005. *Eksistensi Tanah Ulayat Kaum dan Dinamika Relasi Sosial Masyarakat Minangkabau di Wilayah Pinggiran Kota*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand
- Haryani, 2011. *Bunga Rampai Tata Ruang Kota Padang*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Miftahul Huda, 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Musyair Zainuddin, 2010. *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*. Jogjakarta; Ombak
- Sjafnir Dt Kando Marajo, 2006. *Sirih Pinang Adat Minangkabau*. Padang: Sentra Budaya.
- Suradi, dkk (2012; 12). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta: P3KS Press.